

# KEBIJAKAN IMPLEMENTASI AKREDITASI DALAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DI MTS IBAD AR RAHMAN ISLAMIC BOARDING SCHOOL CIMANUK PANDEGLANG

*Accreditation Implementation Policy in Improving the Quality of Education at Mts  
Ibad Ar Rahman Islamic Boarding School Cimanuk Pandeglang*

**Ade Hidayatullah<sup>1</sup>**

#### **Institusi**

<sup>1</sup>MTS Ibad Ar Rahman Islamic  
Boarding School

#### **Email**

<sup>1</sup>hidayatullah.a@gmail.com

#### **Penulis korespondensi**

Ade Hidayatullah  
Jl. Raya Cikoromoy KM. 01.  
Kabupaten Pandeglang  
Hidayatullah.a@gmail.com

#### **Riwayat artikel**

Dikirimkan Mei 2021  
Disetujui Juni 2021  
Diterbitkan Juni 2021

#### **Abstract:**

*This research focuses on the policy, implementation, and follow-up of accreditation in improving the quality of education at MTs Ibad Ar Rahman Islamic Boarding School, Cimanuk Pandeglang. The purpose of this study are: 1) To find out the accreditation policy in improving the quality of education at MTs Ibad Ar Rahman Islamic Boarding School, 2) To find out the implementation of accreditation in improving the quality of education at MTs Ibad Ar Rahman Islamic Boarding School, and 3) To find out the follow up accreditation result in improving the quality of education at MTs Ibad Ar Rahman Islamic Boarding School. This research is a qualitative research, data collection was carried out using interview and observation techniques. To avoid mistakes, a data validity check is carried out with techniques to improve perseverance, triangulation, and member check. The results showed that the accreditation policy in improving the quality of education in MTs Ibad Ar Rahman Islamic Boarding School was made through several stages namely the stage of agenda setting, policy formulation, policy legitimacy, and policy implementation. Meanwhile, some of the policy products produced include the policy of forming a work team, division of tasks, and determining quality targets. The implementation of accreditation in improving the quality of education at MTs Ibad Ar Rahman Islamic Boarding School is divided into four stages, namely the preparation stage, the filing stage, the visitation stage, and the follow-up stage. And the follow-up of the results of accreditation in improving the quality of education at MTs Ibad Ar Rahman Islamic Boarding School is by making a number of policies covering the curriculum, student affairs, science and IT laboratory teams,*

*the library section, the administration section, to the professionalism, human resources, and budget efficiency.*

**Keywords:** *Policy, Implementation, Accreditation, Education Quality.*

**Abstrak:**

Penelitian ini terfokus pada kebijakan, implementasi, dan tindak lanjut akreditasi dalam peningkatan mutu pendidikan di MTs Ibad Ar Rahman Islamic Boarding School, Cimanuk Pandeglang. Tujuan penelitian ini yaitu : 1) Untuk mengetahui kebijakan akreditasi dalam meningkatkan mutu pendidikan di MTs Ibad Ar Rahman Islamic Boarding School, 2) Untuk mengetahui implementasi akreditasi dalam meningkatkan mutu pendidikan di MTs Ibad Ar Rahman Islamic Boarding School, dan 3) Untuk mengetahui tindak lanjut hasil akreditasi dalam meningkatkan mutu pendidikan di MTs Ibad Ar Rahman Islamic Boarding School. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan observasi. Untuk menghindari kesalahan, maka diadakan pemeriksaan keabsahan data dengan teknik meningkatkan ketekunan, triangulasi, dan member check. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan akreditasi dalam meningkatkan mutu pendidikan di MTs Ibad Ar Rahman Islamic Boarding School dibuat melalui beberapa tahap yaitu tahap penyusunan agenda, formulasi kebijakan, legitimasi kebijakan, dan implementasi kebijakan. Adapun beberapa produk kebijakan yang dihasilkan meliputi kebijakan pembentukan tim kerja, pembagian tugas, dan penentuan target mutu. Implementasi akreditasi dalam meningkatkan mutu pendidikan di MTs Ibad Ar Rahman Islamic Boarding School dibagi kedalam empat tahap yaitu tahap persiapan, tahap pemberkasan, tahap visitasi, dan tahap tindak lanjut. Dan tindak lanjut hasil akreditasi dalam meningkatkan mutu pendidikan di MTs Ibad Ar Rahman Islamic Boarding School adalah dengan dibuatkannya beberapa kebijakan yang meliputi bidang kurikulum, bagian kesiswaan, tim laboratorium IPA dan IT, bagian keperpustakaan, bagian tata usaha, hingga ke sisi profesionalisme, SDM, dan efisiensi anggaran.

**Kata kunci:** Kebijakan, Implementasi, Akreditasi, Mutu Pendidikan.

## I. PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Program akreditasi ini memberikan suatu penilaian mutu terhadap sebuah lembaga pendidikan. Melalui nilai akreditasi ini, masyarakat atau konsumen pendidikan akan mendapatkan gambaran akuntabilitas serta kelayakan dari sebuah lembaga pendidikan. Dalam program akreditasi ini, pemerintah melakukan penilaian berdasarkan kriteria pada Standar Nasional Pendidikan.

Dalam Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 2013, disebutkan bahwa Standar Nasional Pendidikan tersebut mencakup delapan standar yaitu standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Kedelapan standar ini haruslah sesuai dengan kriteria yang ditentukan agar sebuah lembaga pendidikan dinyatakan layak dan akuntabel dalam penyelenggaraan proses pendidikannya.

Berdasarkan keterangan dan data yang didapatkan dari kepala madrasah, bagian kurikulum, serta mudir ma'had Ibad Ar Rahman bahwa dalam peringkat akreditasi A ini, nilai yang paling rendah diperoleh dari penilaian standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar kompetensi lulusan, dan standar proses. Seiring berjalannya waktu, hingga tahun 2019, hanya tinggal standar pendidik dan tenaga kependidikan saja yang masih belum bisa mencapai nilai memuaskan. Adapun nilai tertinggi diperoleh dari standar pembiayaan dan standar pengelolaan. Sementara standar lainnya berada diantara keduanya.

Keterangan lain yang diperoleh diantaranya bahwa didapati sebagian besar guru belum mampu merancang rencana pelaksanaan pembelajaran dengan baik dan benar, sebagian besar guru belum tersertifikasi pendidik atau belum mengikuti program Pendidikan Profesi Guru (PPG), hingga masih didapatinya guru yang mengajar tidak sesuai dengan latar belakang keilmuannya. Hal seperti ini haruslah menjadi perhatian sekolah dalam melakukan tindak lanjut hasil evaluasi dari program akreditasi.

Merujuk pada beberapa fenomena yang terjadi, maka didapatlah gambaran bahwa penting kiranya dilakukan penelitian terhadap kebijakan implementasi akreditasi dalam peningkatan mutu pendidikan khususnya di lembaga pendidikan MTs Ibad Ar Rahman Islamic Boarding School. Penelitian untuk mengetahui secara komperhensif tentang bagaimana kebijakan yang dibuat oleh sekolah dalam melaksanakan proses akreditasi, bagaimana implementasi dari kebijakan tersebut, dan bagaimana tindak lanjut hasil dari penilaian akreditasi yang dilakuakn oleh

madrasah. Sehingga, benchmark ini memang benar-benar bisa menjadi rujukan yang valid untuk menggambarkan mutu dari sekolah.

### **Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka fokus dan subfokus penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### 1. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada kebijakan implementasi akreditasi dalam meningkatkan mutu pendidikan di MTs Ibad Ar Rahman Islamic Boarding School.

#### 2. Subfokus Penelitian

Sedangkan subfokus penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Kebijakan akreditasi dalam meningkatkan mutu pendidikan di MTs Ibad Ar Rahman *Islamic Boarding School*.
- b. Implementasi akreditasi dalam meningkatkan mutu pendidikan di MTs Ibad Ar Rahman *Islamic Boarding School*.
- c. Tindak lanjut hasil akreditasi dalam meningkatkan mutu pendidikan di MTs Ibad Ar Rahman *Islamic Boarding School*.

Palatino Linotype 12, *justify*, 1,15 spasi, paragraf pertama menjorok 6 ketuk penulisan kalimat antar paragraf dengan tanpa spasi (*no before and after space*). latar belakang masalah yang ditulis baik secara eksplisit maupun implisit harus memuat isu hukum yang didahului dengan menggambarkan masalah aktual yang menjadi dasar penelitian disertai dengan referensi (sitasi) yang memadai. Pada bagian akhir latar belakang masalah, penulis harus mengemukakan dengan jelas rumusan masalah yang akan diteliti. Penulis tidak diperkenankan memberikan sub judul pada pendahuluan.

### **Tujuan Penelitian**

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan akreditasi dalam meningkatkan mutu pendidikan di MTs Ibad Ar Rahman Islamic Boarding School. Adapun secara khusus tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kebijakan akreditasi dalam meningkatkan mutu pendidikan di MTs Ibad Ar Rahman *Islamic Boarding School*.
2. Untuk mengetahui implementasi akreditasi di MTs Ibad Ar Rahman *Islamic Boarding School*.
3. Untuk mengetahui tindak lanjut hasil akreditasi di MTs Ibad Ar Rahman *Islamic Boarding School*.

## **Kajian Teori Kebijakan**

Carl J Federick sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008:7) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang sebuah memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Solichin Abdul Wahab mengemukakan bahwa istilah kebijakan sendiri masih terjadi silang pendapat dan perdebatan dari para ahli (Wahab, 2008:40-50). Maka untuk memahami istilah kebijakan, Solichin Abdul Wahab memberikan beberapa pedoman sebagai berikut :

- 1) Kebijakan harus dibedakan dari keputusan
- 2) Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi
- 3) Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan
- 4) Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan
- 5) Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai
- 6) Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implisit
- 7) Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu
- 8) Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan yang bersifat intra organisasi
- 9) Kebijakan publik meski tidak eksklusif menyangkut peran kunci lembaga-lembaga pemerintah
- 10) Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif.

Menurut Budi Winarno (2007:15), istilah kebijakan (policy term) mungkin digunakan secara luas seperti pada “kebijakan luar negeri Indonesia”, “kebijakan ekonomi Jepang”, dan atau mungkin juga dipakai untuk menjadi sesuatu yang lebih khusus, seperti misalnya jika kita mengatakan kebijakan pemerintah tentang birokratisasi dan deregulasi. Namun baik Solihin Abdul Wahab maupun Budi Winarno (2009:11) sepakat bahwa istilah kebijakan ini penggunaannya sering

dipertukarkan dengan istilah lain seperti tujuan (goals) program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, standar, proposal dan grand design.

### **Impelementasi**

Jika merujuk pengertian pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, implementasi berarti pelaksanaan atau penerapan. Implementasi intinya adalah proses untuk memastikan terlaksana dan tercapainya suatu kebijakan. Implementasi juga mencakup penyediaan sarana untuk membuat sesuatu dan memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesama. (Yusuf, 2013:143). Konsep implementasi memang semakin banyak dibicarakan dengan berbagai pandangan yang dikemukakan. Sehingga memerlukan definisi yang tepat untuk menggambarkannya secara inti dari implentasi itu sendiri.

Implentasi merupakan kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (to deliver policy output) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (target group) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan (Purwanto dkk, 1991:21). Selain itu implentasi juga didefinisikan sebagai suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri (Agustiono, 2010:139).

Model manajemen Implementasi menurut Riant (2004:163) menggambarkan pelaksanaan atau implementasi kebijakan di dalam konteks manajemen berada di dalam kerangka organizing-leading-controlling. Jadi ketika kebijakan sudah dibuat, maka tugas selanjutnya adalah mengorganisasikan, melaksanakan kepemimpinan untuk memimpin pelaksanaan dan melakukan pengendalian pelaksanaan tersebut.

Pengertian - pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Jadi, implementasi dimaksudkan sebagai tindakan individu publik yang diarahkan pada tujuan, serta ditetapkan dalam keputusan, dan memastikan terlaksananya dan tercapainya suatu kebijakan, serta memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesama. Adapun makna implementasi akreditasi berarti aktivitas proses dalam pelaksanaan penilaian sekolah oleh lembaga yang berwenang guna memberikan akuntabilitas publik.

### **Akreditasi**

Akreditasi sekolah merupakan sebuah kegiatan penilaian yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang telah diberi kewenangan untuk menentukan kelayakan suatu program dan/atau satuan pendidikan pada jalur

pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan, berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, sebagai bentuk akuntabilitas publik yang dilakukan secara objektif, adil, transparan, dan komperhensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan.

Akreditasi sekolah pada dasarnya adalah kegiatan penilaian (assessment) yang dilakukan secara sistematis dan komperhensif melalui kegiatan evaluasi diri dan evaluasi eksternal (visitasi) untuk menentukan kelayakan dan kinerja sekolah (Machali, 2016:240). Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan akreditasi sekolah adalah suatu kegiatan penilaian kelayakan suatu sekolah berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dan dilakukan oleh BAN-S/M yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan peringkat kelayakan.

Pengertian lain mengenai akreditasi adalah suatu proses penilaian secara komperhensif terhadap kelayakan dan kinerja satuan dan/atau program pendidikan, yang dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas publik (Machali, 2016:240). Di dalam proses akreditasi, sebuah sekolah dievaluasi dalam kaitannya dengan arah dan tujuannya, serta didasarkan kepada keseluruhan kondisi sekolah sebagai sebuah institusi belajar. Akreditasi merupakan akar regulasi (self-regulated) agar sekolah/madrasah mengenal kekuatan dan kelemahan serta melakukan upaya yang terus menerus untuk meningkatkan kekuatan dan memperbaiki kelemahannya. (Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Ditjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Depdiknas, 2007:3)

Latar belakang adanya kebijakan akreditasi sekolah/madrasah di Indonesia adalah bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu. Untuk dapat menyelenggarakan pendidikan yang bermutu, maka setiap satuan /program pendidikan harus memenuhi atau melampaui standar yang dilakukan melalui kegiatan akreditasi terhadap kelayakan setiap satuan/program pendidikan. Maksud dari adanya akreditasi adalah agar penyelenggaraan pendidikan pada semua lingkup mengacu pada Standar Nasional Pendidikan. Hal ini terkait dengan usaha pengembangan dan membangun sistem pengendalian mutu pendidikan nasional yang dilakukan melalui tiga hal.

### **Mutu**

Berbicara mutu, Sallis (1993:95) menjelaskan bahwa mutu tidak dapat dilepaskan dari tiga tokoh penting tentang mutu, yaitu Edwards Deming, Joseph

Juran, dan Philip B. Crosby. Menurut Deming dalam Sallis (1993:97), masalah mutu terletak pada masalah manajemen. Ia mengajarkan pentingnya pendekatan yang tepat dan sistematis serta pendekatan dengan dasar statistik untuk memecahkan masalah kualitas. Oleh karena itu, Deming mendefinisikan mutu sebagai kesesuaian dengan kebutuhan pasar atau konsumen. Perusahaan yang bermutu ialah perusahaan yang menguasai pangsa pasar karena hasil produksinya sesuai dengan kebutuhan konsumen sehingga menimbulkan kepuasan bagi konsumen. Jika konsumen merasa puas, mereka akan setia dalam membeli produk perusahaan tersebut baik berupa barang maupun jasa (Deming, W.E.1986:176).

Mendefinisikan konsep mutu tidaklah mudah karena antara tokoh yang satu dengan yang lain berbeda-beda. Mutu menurut Arcaro (2007:75) adalah sebuah proses terstruktur untuk memperbaiki keluaran yang dihasilkan. Garvin dan Davis dalam buku Hadis (2010:86) mendefinisikan mutu sebagai suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, tenaga kerja/jasa, proses, dan tugas serta lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan pelanggan.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa meskipun banyak definisi mutu yang berbeda-beda, semua sepakat bahwa mutu ditentukan oleh pelanggan. Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa : mutu sangat ditentukan oleh pelanggan atau pemakai suatu produk; mutu mencakup produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan; mutu merupakan kondisi yang selalu berubah, artinya penilaian suatu mutu sangat tergantung pada kondisi, hari ini dianggap bermutu mungkin dimasa mendatang menjadi kurang bermutu.

Di dalam PP 32 tahun 2013 disebut bahwa pendidikan di Indonesia menggunakan delapan standar yang jadi acuan dalam membangun dan meningkatkan kualitas pendidikan, Standar Nasional Pendidikan merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, ada delapan standar yang menjadi kriteria minimal tersebut yaitu:

- a) Standar isi mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu yang memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan/akademik.
- b) Standar proses. Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi



- prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.
- c) Standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Standar kompetensi lulusan meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran dan mata kuliah atau kelompok mata kuliah.
  - d) Standar pendidik dan tenaga kependidikan. Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, kompetensi sosial.
  - e) Standar sarana dan prasarana. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat ibadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
  - f) Standar pengelolaan. Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas. Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi menerapkan otonomi perguruan tinggi yang dalam batas-batas yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku memberikan kebebasan dan mendorong kemandirian dalam pengelolaan akademik, operasional,

personalia, keuangan, dan area fungsional pengelolaan lainnya yang diatur oleh masing-masing perguruan tinggi.

- g) Standar pembiayaan. Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal.
- h) Standar penilaian pendidikan. Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas: penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi terdiri atas: penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan tinggi. Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi diatur oleh masing-masing perguruan tinggi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## II. METODOLOGI PENELITIAN

### Tempat dan Waktu Penelitian

#### 1. Tempat Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menetapkan tempat penelitian yaitu di MTs Ibad Ar Rahman Islamic Boarding School yang berlokasi di Jl. Raya Cikoromoy KM.01 Cimanuk Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang, Banten. Dipilihnya MTs Ibad Ar Rahman Islamic Boarding School diharapkan bisa memberikan informasi yang sesuai dengan kebutuhan peneliti. Untuk memperoleh informasi tersebut, peneliti memutuskan untuk menggali informasi dari orang yang dianggap mengetahuinya yaitu kepala sekolah dan guru dari madrasah yang bersangkutan.

#### 2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitiannya dilaksanakan pada awal bulan Juli 2020 hingga selesai semua tahapan penelitian.

### Metode dan Langkah-langkah Penelitian

#### 1. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif (qualitative research) terhadap implementasi kebijakan akreditasi dalam peningkatan mutu pendidikan khususnya di madrasah. Dalam penelitian ini, data yang berupa kata-kata tertulis atau lisan atau perilaku, merupakan data yang dapat diamati melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

#### 2. Langkah-langkah Penelitian

Dalam penelitian kualitatif ini, prosedur penelitian praktis yang direncanakan dalam proses penelitian secara sistematis adalah sebagai berikut :

a) Tahap Pra-lapangan

Pada tahap pra-lapangan merupakan tahap penjajakan lapangan. Ada enam langkah yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu menyusun rancangan penelitian, memilih lapangan penelitian, menjajaki dan menilai lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan perlengkapan penelitian

b) Tahap Lapangan

Dalam tahap ini dibagi atas tiga bagian yaitu memahami latar penelitian dan persiapan diri, memasuki lapangan, berperan serta sambil mengumpulkan data

c) Tahap Analisis Data

Analisis data merupakan suatu tahap mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar agar dapat memudahkan dalam menentukan tema dan dapat merumuskan hipotesa kerja yang sesuai dengan data. Pada tahap ini data yang diperoleh dari berbagai sumber, dikumpulkan, diklasifikasikan dan analisa dengan komparasi konstan.

d) Tahap Penulisan Laporan

Penulisan laporan merupakan hasil akhir dari suatu penelitian, sehingga dalam tahap akhir ini peneliti mempunyai pengaruh terhadap hasil penulisan laporan. Penulisan laporan yang sesuai dengan prosedur penulisan yang baik karena menghasilkan kualitas yang baik pula terhadap hasil penelitian.

### **Teknik Pengambilan dan Analisis Data**

#### **1. Teknik Pengambilan Data**

Teknik pengambilan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan tiga cara yaitu observasi, wawancara, dokumentasi.

Dalam menyusun pedoman wawancara, observasi dan studi dokumentasi, akan merujuk kepada indikator-indikator yang telah ditentukan. Indikator untuk setiap subfokus disajikan pada Tabel 3.2 berikut :

**Tabel 3.2. Indikator Penelitian**

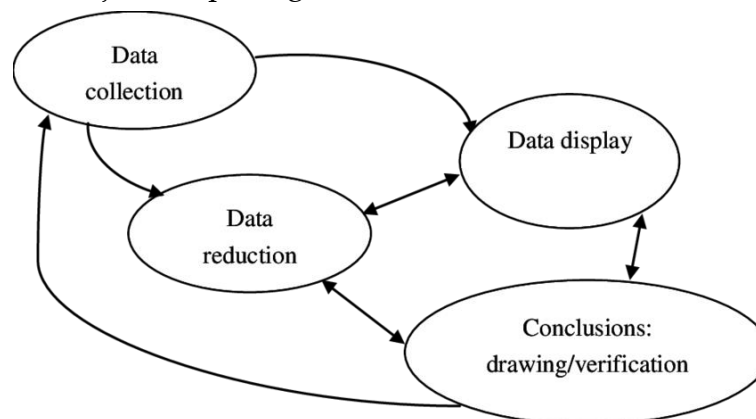
<b>Fokus Penelitian</b>	<b>Sub Fokus</b>	<b>Indikator</b>
-------------------------	------------------	------------------

<b>Kebijakan Implementasi Akreditasi</b>	Implementasi Akreditasi	1. Objektif : Informasi yang diberikan berdasarkan kenyataan yang ada sesuai dengan fakta tentang kelayakan dan kinerja sekolah.
		2. Komprehensif : Penilaian pelaksanaan akreditasi tidak hanya pada aspek tertentu.
		3. Adil : Mendapatkan pelayanan yang adil sesuai dengan kriteria dan mekanisme kerja.
		4. Transparan : Informasi akreditasi dapat diakses oleh siapa saja yang membutuhkan.
		5. Akuntabel : Pelaksanaan akreditasi dapat dipertanggung jawabkan.
		6. Efektif : Hasil akreditasi memberikan informasi yang jelas dan tepat.
		7. Memandirikan : Berupaya dan memacu peningkatan mutu.
		8. Mandatori : Akreditasi dilakukan untuk setiap sekolah sesuai dengan kesiapan sekolah.
	Implementasi Akreditasi	1. Standar Isi
		2. Standar Proses
		3. Standar Kompetensi Lulusan
		4. Standar PTK
		5. Standar Sarana dan Prasarana
		6. Standar Pengelolaan

		7. Standar Pembiayaan
		8. Standar Penilaian
	Kebijakan Akreditasi	1. Peran Kepala Sekolah 2. Peran Tim Penjamin Mutu
	Tindak Lanjut Hasil	1. Peran Kepala Sekolah 2. Peran Guru

## 2. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis data model Miles and Huberman. Miles and Huberman dalam Sugiyono (2014:247) mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan dilakukan secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Kegiatan yang dilakukan yaitu *data reduction*, *data display* dan *conclusion drawing/ verification*. Data yang telah diperoleh dari lapangan, kemudian diolah agar lebih sederhana. Langkah-langkah analisis ditunjukkan pada gambar berikut :



**Gambar 3.1 Komponen dalam analisis data (*interactive model*)**

Adapun untuk uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif ini meliputi uji *credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reabilitas) dan *confirmability* (obyektifitas).

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Kebijakan Akreditasi

Yang menjadi sorotan para tim penjamin mutu sekolah terhadap program akreditasi yaitu dimana akreditasi hanya sekadar proses pemenuhan nilai semata yang sama sekali tanpa adanya tindak lanjut dari hasil yang telah didapatkan. Namun, MTs Ibad Ar Rahman Islamic Boarding School, memberikan contoh bagaimana mutu madrasah itu, tidak berawal dari nilai yang didapat, namun berasal dari komitmen semua warga madrasah untuk menjaga mutu dan melaksanakan komitmen mutu yang ada.

Dalam pembuatan kebijakan, MTs Ibad Ar Rahman *Islamic Boarding School*, lebih banyak menggunakan pendekatan evaluatif dibandingkan dengan pendekatan empirik. Hal ini disebabkan karena pihak top management selalu menginginkan target nyata dalam bentuk nilai pada setiap kebijakan yang dibuat di dalam lingkungan yayasannya.

Kebijakan akreditasi dalam meningkatkan mutu pendidikan di MTs Ibad Ar Rahman *Islamic Boarding School* dibuat melalui beberapa tahap yaitu :

1. Tahap penyusunan agenda. Pada tahap ini Top Leader seperti ketua yayasan, ketua tim Quality Assurance (QA), Mudir Ma'had, dan kepala madrasah, melakukan evaluasi dan membuat agenda pertemuan bersama seluruh ketua tim akreditasi.
2. Tahap formulasi kebijakan. Selanjutnya, pada pertemuan tim, kepala sekolah memaparkan hasil evaluasi dan menyusun rencana pelaksanaan akreditasi bersama seluruh ketua tim akreditasi.
3. Tahap legitimasi kebijakan. Setelah rencana pelaksanaan akreditasi dibuat, selanjutnya rencana tersebut didiskusikan kembali bersama seluruh guru dan staf, guna memenuhi kekurangan dan untuk disepakati bersama.
4. Tahap implementasi kebijakan. Tahap ini merupakan pelaksanaan dari kebijakan yang sudah disepakati bersama sebelumnya. Pada tahap ini, seluruh tim bekerja untuk memenuhi masing-masing tugasnya.

Beberapa produk kebijakan akreditasi yang dihasilkan pada tahap legitimasi meliputi kebijakan pembentukan tim kerja, pembagian tugas, dan penentuan target perbaikan mutu yang ingin dicapai.

#### Implementasi Akreditasi

Tahap implementasi masih menjadi tahap yang membutuhkan perhatian khusus dan fokus dari tiap bagiannya. Kepala madrasah harus terus menjadi pengingat bagi seluruh tim dalam menjalankan tugasnya masing-masing.

Dalam implementasinya, kebijakan akreditasi dalam meningkatkan mutu pendidikan di MTs Ibad Ar Rahman *Islamic Boarding School* juga dibagi kedalam empat tahap yaitu :

1. Tahap persiapan. Pada tahap persiapan ini termasuk didalamnya adalah pembuatan kebijakan akreditasi madrasah, mengecek kesiapan berkas, dan lain sebagainya.
2. Tahap pemberkasan. Tahap pemberkasan disini diisi dengan kegiatan pemenuhan berkas bukti dan isian baik secara fisik maupun online sebagai proses evaluasi internal oleh madrasah.
3. Tahap visitasi. Tahap ini merupakan tahap evaluasi eksternal yang dilakukan oleh asesor atas pertimbangan laporan evaluasi diri yang telah dilakukan.
4. Tahap tindak lanjut. Setelah hasil penilaian akreditasi selesai, maka madrasah akan mengetahui kelemahan dan kelebihan madrasah. Kedua hal tersebut menjadi sebuah acuan madrasah untuk melakukan tindak lanjut hasil penilaian akreditasi.

Pada implementasinya, kebijakan akreditasi yang dibuat oleh sekolah masih mengalami kelemahan yaitu kurang ketatnya monitoring kepala sekolah kepada tim akreditasi.

Standar pendidik dan tenaga kependidikan mendapatkan nilai yang paling rendah. Faktor terbesar yang menyebabkan hal ini dikarenakan hampir seluruh pendidik yang mengajar di MTs Ibad Ar Rahman *Islamic Boarding School* ini masih belum bersertifikat pendidik dan mengajar tidak sesuai dengan keahliannya atau sesuai dengan ijazah.

Dalam praktiknya, MTs Ibad Ar Rahman *Islamic Boarding School* nyatanya masih mendapat beberapa kendala dalam implementasi kebijakan akreditasinya. Masih ada hal yang tidak sesuai dengan rencana rencana implementasi atau saat pembuatan kebijakan.

Secara umum dalam implementasi kebijakan akreditasi MTs Ibad Ar Rahman *Islamic Boarding School* mengalami beberapa kesulitan, terutama pada tahap pemberkasan atau pengisian borang dan pada sisi monitoring. Keduanya menjadi bahan evaluasi bagi madrasah untuk membuat kebijakan yang lebih baik

lagi di masa yang akan datang. Sehingga, proses penilaian akreditasi khususnya akan lebih baik.

### **Tindak Lanjut Hasil Akreditasi**

Akreditasi di MTs Ibad Ar Rahman *Islamic Boarding School*, dipahami sebagai sebuah bahan untuk evaluasi diri terhadap standar mutu yang diterapkan di madrasah. Akreditasi menjadi salah satu pemicu MTs Ibad Ar Rahman *Islamic Boarding School* untuk terus berusaha memenuhi standar yang ditentukan secara nasional dengan sebaik mungkin. Karena mutu menjadi sorotan utama di MTs Ibad Ar Rahman *Islamic Boarding School*, maka begitu juga akreditasi yang benar-benar dijadikan bahan acuan evaluasi mutu di madrasah.

Evaluasi yang dilakukan MTs Ibad Ar Rahman *Islamic Boarding School* dilakukan secara bertahap dimulai dari EDS dan RENSTRA setelah itu adanya sebuah langkah kongkret yang diwujudkan dalam perencanaan program yang baru.

Jadi, tindak lanjut dari hasil penilaian akreditasi tersebut dijabarkan oleh seolah menjadi berbagai program yang konkrit. Dimana, setiap program yang dibuat akan selalu terus diupayakan agar terus meningkat dan terlaksana sesuai dengan target capaian yang telah disepakati bersama.

Tindak lanjut hasil akreditasi dalam meningkatkan mutu pendidikan di MTs Ibad Ar Rahman *Islamic Boarding School* adalah dengan dibuatkannya beberapa kebijakan yang meliputi aspek pada bidang kurikulum, bagian kesiswaan, tim laboratorium IPA dan IT, bagian perpustakaan, bagian tata usaha, hingga ke sisi profesionalisme, SDM, dan efisiensi anggaran. Kebijakan-kebijakan yang dibuat tersebut seperti meningkatkan target pengumpulan RPP guru menjadi 100% yang tadinya hanya 90%, adanya target dalam supervisi guru, meningkatkan persentase kehadiran guru menjadi 90%, kehadiran siswa harus meningkat menjadi 90%, dan lain sebagainya.

## **IV. PENUTUP**

### **SIMPULAN**

Kebijakan akreditasi dalam peningkatkan mutu pendidikan di MTs Ibad Ar Rahman *Islamic Boarding School* dibuat melalui beberapa tahap yaitu :

1. Tahap penyusunan agenda. Pada tahap ini Top Leader seperti ketua yayasan, ketua tim Quality Assurance (QA), Mudir Ma'had, dan kepala



madrasah, melakukan evaluasi dan membuat agenda pertemuan bersama seluruh ketua tim akreditasi.

2. Tahap formulasi kebijakan. Selanjutnya, pada pertemuan tim, kepala sekolah memaparkan hasil evaluasi dan menyusun rencana pelaksanaan akreditasi bersama seluruh ketua tim akreditasi.
3. Tahap legitimasi kebijakan. Setelah rencana pelaksanaan akreditasi dibuat, selanjutnya rencana tersebut didiskusikan kembali bersama seluruh guru dan staf, guna memenuhi kekurangan dan untuk disepakati bersama.
4. Tahap implementasi kebijakan. Tahap ini merupakan pelaksanaan dari kebijakan yang sudah disepakati bersama sebelumnya. Pada tahap ini, seluruh tim bekerja untuk memenuhi masing-masing tugasnya.

Beberapa produk kebijakan akreditasi yang dihasilkan pada tahap legitimasi meliputi kebijakan pembentukan tim kerja, pembagian tugas, dan penentuan target perbaikan mutu yang ingin dicapai.

Dalam implementasinya, kebijakan akreditasi dalam meningkatkan mutu pendidikan di MTs Ibad Ar Rahman *Islamic Boarding School* juga dibagi kedalam empat tahap yaitu :

1. Tahap persiapan. Pada tahap persiapan ini termasuk didalamnya adalah pembuatan kebijakan akreditasi madrasah, mengecek kesiapan berkas, dan lain sebagainya.
2. Tahap pemberkasan. Tahap pemberkasan disini diisi dengan kegiatan pemenuhan berkas bukti dan isian baik secara fisik maupun online sebagai proses evaluasi internal oleh madrasah.
3. Tahap visitasi. Tahap ini merupakan tahap evaluasi eksternal yang dilakukan oleh asesor atas pertimbangan laporan evaluasi diri yang telah dilakukan.
4. Tahap tindak lanjut. Setelah hasil penilaian akreditasi selesai, maka madrasah akan mengetahui kelemahan dan kelebihan madrasah. Kedua hal tersebut menjadi sebuah acuan madrasah untuk melakukan tindak lanjut hasil penilaian akreditasi.

Pada implementasinya, kebijakan akreditasi yang dibuat oleh sekolah masih mengalami kelemahan yaitu kurang ketatnya monitoring kepala sekolah kepada tim akreditasi.

Adapun dalam tindak lanjut hasil akreditasi dalam meningkatkan mutu pendidikan di MTs Ibad Ar Rahman *Islamic Boarding School* adalah dengan dibuatkannya beberapa kebijakan yang meliputi aspek pada bidang kurikulum, bagian kesiswaan, tim laboratorium IPA dan IT, bagian perpustakaan, bagian tata usaha, hingga ke sisi profesionalisme, SDM, dan efisiensi anggaran. Kebijakan-kebijakan yang dibuat tersebut seperti meningkatkan target pengumpulan RPP guru menjadi 100% yang tadinya hanya 90%, adanya target dalam supervisi guru, meningkatkan persentase kehadiran guru menjadi 90%, kehadiran siswa harus meningkat menjadi 90%, dan lain sebagainya.

## SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, maka rekomendasi yang diajukan sebagai berikut :

1. Bagi kepala sekolah, kebijakan akreditasi dalam meningkatkan mutu pendidikan di MTs Ibad Ar Rahman *Islamic Boarding School*, terutama yang terkait dengan proses persiapan penilaian akreditasi, baiknya memperpanjang jangka waktu pengerjaannya. Jadi, yang tadinya hanya minimal satu tahun, menjadi minimal tiga tahun atau sesegera mungkin setelah proses penilaian akreditasi selesai, untuk langsung mempersiapkan ke penilaian berikutnya.
2. Bagi kepala sekolah, implementasi akreditasi dalam meningkatkan mutu pendidikan di MTs Ibad Ar Rahman *Islamic Boarding School*, harus lebih mendapatkan monitoring yang lebih ketat. Sehingga, rencana yang telah disusun bisa berjalan dengan baik. Adapun bagi tim kerja di tiap bagiannya yang terdiri dari guru dan staf, ada baiknya tetap mengikuti rencana proses penilaian akreditasi yang sudah dibuat. Sehingga, tugas akreditasi tidak lagi menjadi beban, dan faktor kekurangan dan kehilangan data bisa diminimalisir.
3. Bagi kepala sekolah, tindak lanjut hasil akreditasi dalam meningkatkan mutu pendidikan di MTs Ibad Ar Rahman *Islamic Boarding School*, akan lebih baik jika lebih terfokus kepada standar pendidik dan tenaga kependidikan. Dengan catatan, hal baik lainnya haruslah tetap dipertahankan. Mengusahakan guru untuk mengajar sesuai latar belakang pendidikannya. Dan bagi guru, hendaklah tetap berusaha mengajar dengan sebaik mungkin walaupun tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya.

## REFERENSI

- Arcaro, Jerome S. 2007. *Pendidikan Berbasis Mutu : Prinsip-prinsip dan Tata Langkah Penerapan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- BAN-SM. 2019. *Pedoman Akreditasi Sekolah/Madrasah 2019*. Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah.
- \_\_\_\_\_. 2019. *Prosedur Operasional Standar (POS) Pelaksanaan Akreditasi*. Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah.
- \_\_\_\_\_. 2019. *Perangkat Akreditasi SMP/MTs*. Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah.
- Fatah, Nanang. *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Bandung : Remaja Rosda Karya.
- Fatkuroji. 2012. *Analisis Implementasi Kebijakan Pembelajaran Terpadu Terhadap Minat Konsumen Pendidikan : Studi SDIT Bina Amal dan SD Al- Azhar 29BSB Semarang*. Semarang : UIN Walisongo.
- Hawi, Akmal. 2005. *Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam*. Palembang : IAIN Raden Fatah Press.
- Hadis, dkk. 2010. *Manajemen Mutu Pendidikan*. Bandung : Alfabeta.
- Hasbullah, H.M. 2015. *Kebijakan Pendidikan (Dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia)*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Hidayah, Nurul. 2016. *Kepemimpinan Visioner Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan*. Yogyakarta : Ar-Ruzz Media.
- Juran, J.M. 1993. *Juran on Leadership for Quality*. New York : Macmillan.
- Machali, Imam dkk. 2016. *The Handbook of Education Management : Teori dan Praktik Pengelolaan Sekolah atau Madrasah di Indonesia*. Jakarta : Prenada Media Group.
- Marjuki, dkk. 2018. *Developing An Accreditation Model Of Senior Secondary School*. *Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan*, v.22, (105-117).
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosda Karya.
- Mulyadi. 2010. *Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Mengembangkan Budaya Mutu*. Malang : UIN Maliki Press.
- Nawawi, dkk. 1994. *Penelitian Terapan*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Rahardjo, Mudjia. 2010. *Pemikiran Kebijakan Pendidikan Kontemporer*. Malang : UIN Maliki Press.
- Sekretariat Negara. 2003. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2005. *Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan*. Jakarta.

- Sallis, Edward. 2012. *Total Quality Management in Education : Manajemen Mutu Pendidikan*. Yogyakarta : IRCiSoD.
- Sarwani, A. 2010. *Akreditasi Muara Peningkatan Mutu Pendidikan*. Palembang : Tidak Dipublikasikan.
- Sholihin, Emilia Nur Chasanah, dkk. 2018. *Pengelolaan Persiapan Akreditasi Sekolah*. *Jurnal Administrasi dan Manajemen Pendidikan*, v.1, (171-178).
- Soyomukti, Nurani. 2010. *Teori-teori Pendidikan*. Yogyakarta : Ar-Ruz Media.
- Irianto, Y.B. 2012. *Kebijakan Pembaruan Pendidikan : Konsep, Teori dan Model*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Suharsaputra. 2013. *Administrasi Pendidikan*. Bandung : Refika Aditama.
- Sukardi. 2005. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Sukmadinata, Nana S. 2006. *Pengendalian Mutu Pendidikan Sekolah Menengah*. Bandung : Refika Aditama.
- Syagala, Syaiful. 2008. *Administrasi Pendidikan Kontemporer*. Bandung : Alfabeta.
- Tilaar, H.A.R, dan Nugroho, Riant. 2009. *Kebijakan Pendidikan : Pengantar Untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Umar, Yusuf. 2016. *Manajemen Pendidikan Madrasah Bermutu*. Bandung : Refika Aditama.
- Widodo, Suparno Eko. 2011. *Manajemen Mutu Pendidikan*. Jakarta : Ardadizya Jaya.
- Zamroni. 2011. *Dinamika Peningkatan Mutu*, Yogyakarta : Gavin Kalam Utama.